

PAJAK DAERAH - RETRIBUSI DAERAH
2023

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.8, LD 2023/ NO. 8, 126HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan Daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Daerah maka pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dipungut dengan efektif dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah maka sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No, 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan UU yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 mengatur pajak dan retribusi daerah, mencakup jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, dan PBJT. Peraturan ini menetapkan kewajiban pendaftaran, penghitungan, dan pemungutan pajak serta retribusi, termasuk insentif dan sanksi bagi wajib pajak. Peraturan ini mengatur penggunaan hasil penerimaan pajak untuk pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 mengatur pajak dan retribusi daerah, mencakup jenis pajak seperti PBB-P2, BPHTB, dan PBJT. Peraturan ini menetapkan kewajiban pendaftaran, penghitungan, dan pemungutan pajak serta retribusi, termasuk insentif dan sanksi bagi wajib pajak. Mengatur penggunaan hasil penerimaan pajak untuk pembangunan daerah. Peraturan ini mulai berlaku pada 5 Januari 2024, dengan ketentuan tertentu yang berlaku hingga 5 Januari 2025.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 Desember 2023.
- Seluruh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Jumlah Penjelasan 10 halaman.
 - Jumlah Lampiran 49 halaman.